

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan Ke-9 Seri Pustaka Ilmu Administrasi), Jakarta : Ghalia, 1988.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta : Djambatan, 2007.

Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993.

Evans, James dan Lindsay, William. *Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.

Hani T, Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : BPFE, 2001.

Isjoni, *Cooperative Learning*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2001.

Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm.137.

R.Hermanses, SH. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Yogyakarta : diperbanyak oleh Akademi Agraria, 2005.

Sri Sayekti, *Hukum Agraria Nasional*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, Cet. 13, 2014.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982.

Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996.

Syaifullah, Arief & Kusmiarto, *Survey Kadastral Modul MKB-6/3 SKS/ MODUL I - IX*, Yogyakarta : STPN, 2014.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010.

Kamus/Jurnal

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Inggris Oxford

Laporan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Kantah.

Internet

<http://yunitardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 Februari 2019

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_h-i.pdf, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/kegiatan-pendaftaran-tanah/pada-tanggal-16-September-2019>.

<https://omtanah.com/2017/03/12/asas-kontradiktur-delimitasi-pendaftaran-tanah/diakses> pada tanggal 16 September 2019.

<http://kab-bintan.atrpbn.go.id/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Asnen Novizar selaku Kepala Kantah Kabupaten Bintan, tanggal 2 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Reza Wirawardhana selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Kabupaten Bintan, tanggal 3 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Arif Yulianto selaku Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantah Kabupaten Bintan, tanggal 8 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Chairuddin selaku Petugas Ukur Kantah Kabupaten Bintan, tanggal 08 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Syafrizal selaku Petugas Ukur Kantah Kabupaten Bintan, tanggal 09 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, tanggal 6 April 2019.

Wawancara dengan Ibu Erlipessinardiati, tanggal 13 April 2019.

Wawancara dengan Ibu Maiza Saptiyah, tanggal 20 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Anis Adinizam, tanggal 20 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Bob Naime Ginting, tanggal 27 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Apnal Jony, tanggal 4 Mei 2019.

Observasi

Hasil Observasi Lapangan terhadap Bapak Warren A. Kiong, Ibu Asmiati, Bapak Damsiri Agus (diwakili istrinya), Bapak Nurman, Bapak Zainal Nahra, Bapak Jehru Silaen dan Ibu Ernawati